

ABSTRAK

Penggunaan pekerja *outsourcing* pada era globalisasi ini semakin banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tidak terkecuali perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penggunaan pekerja *outsourcing* tersebut perusahaan BUMN harus memperhatikan kesejahteraan dari para pekerja tersebut, apalagi terdapat visi misi Presiden Jokowi untuk menghapuskan penggunaan pekerja *outsourcing* pada perusahaan BUMN dikarenakan hal tersebut banyak merugikan pekerja *outsourcing*. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan BUMN yang tidak menjalankan visi misi Presiden Jokowi tersebut.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pekerja *outsourcing* pada perusahaan BUMN terkait visi misi Presiden Jokowi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe Penelitian Yuridis Normatif, dimana skripsi ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber penelitiannya.

Visi misi Presiden Jokowi untuk menghapuskan sistem kerja *outsourcing* pada perusahaan BUMN memberi angin segar kepada pekerja *outsourcing*. Namun, hingga saat ini hal tersebut masih belum benar-benar terlaksana karena beberapa permasalahan yang ada. Disisi lain, apabila pekerja *outsourcing* tersebut mengalami permasalahan dengan perusahaan BUMN maka pekerja *outsourcing* tersebut dapat mengajukan upaya hukum yaitu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimulai dengan cara penyelesaian Bipartit, Tripartit, dan Pengadilan Hubungan Industrial serta melaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja *Outsourcing*, Perusahaan BUMN, Visi Misi Presiden Jokowi

ABSTRACT

The use of outsourcing workers in this era of globalization is increasingly carried out by companies, including the State-Owned Enterprise (BUMN) company. In the use of outsourced workers, BUMN companies must pay attention to the welfare of these workers, moreover, there is a vision and mission of President Jokowi to eliminate the use of outsourced workers at BUMN companies because it causes a lot of harm to outsourced workers. However, in reality, there are still many BUMN companies that do not carry out President Jokowi's vision and mission.

The purpose of this paper is to find out and understand the legal protection for outsourced workers in BUMN companies related to President Jokowi's vision and mission. The type of research used in the writing of this thesis is Normative Juridical Research, where this thesis uses the literature materials of legislation as a source of research.

President Jokowi's vision and mission to abolish the outsourcing work system for BUMN companies provides a breath of fresh air to outsourcing workers. However, until now this has not been carried out due to several problems. On the other hand, if the outsourcing worker experiences a problem with a BUMN enterprise, the outsourcing worker can submit legal remedies namely, settlement of industrial relations disputes beginning with the settlement of Bipartite, Tripartite, the Industrial Relations Court and reporting to the Labor Inspector.

Keyword: *Legal Protection, Outsourcing Workers, BUMN Companies, Vision Mission of President Jokowi*